

Integrasi Teori Strukturasi Anthony Giddens dan Kajian Feminis pada Kebijakan Sumber Daya Manusia di Tempat Kerja

Paulus Eko Kristianto
paulusekokristianto@gmail.com

Abstrak

Persoalan ketidakadilan gender kerap terjadi di tempat kerja. Hal ini dapat dilihat dari beragam kebijakan sumber daya manusia. Artikel ini mencoba menimbang serius kebijakan tersebut dengan perpaduan teori strukturasi Anthony Giddens dan kajian feminis. Perpaduan ini dibangun melalui penelitian pustaka terhadap buku dan jurnal terkait teori strukturasi Anthony Giddens dan kajian feminis, serta potret pengalaman lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sumber daya manusia belum maksimal memiliki suara keadilan gender, Uraian strukturasi dan feminis menjadi pijakan analisis dan menawarkan transformasi kebijakan dari ketidakadilan gender menjadi adil gender. Sudah seharusnya, kebijakan sumber daya manusia yang ada mengalami transformasi menjadi semakin sensitif gender dan meminimalisasi beragam bentuk ketidakadilan. Tentu, hal ini bukan perkara mudah. Kerjasama dari berbagai pihak menjadi sebuah keniscayaan dan dilakukan bersama.

Kata-kata Kunci: kebijakan, sumber daya manusia, Anthony Giddens, strukturasi, feminis

Abstract

The issue of gender inequality often occurs in the workplace. This can be seen in various human resource policies. This article tries to seriously consider this policy with a combination of Anthony Giddens' structuration theory and feminist studies. This combination was built through library research on books and journals related to Anthony Giddens' structuration theory and feminist studies, as well as portraits of field experiences. The results of the study indicate that human resource policies have not yet maximally voiced gender justice. Structural and feminist descriptions are the basis for analysis and offer policy transformation from gender injustice to gender justice. As a matter of fact, existing human resource policies undergo a transformation to become more gender-sensitive and minimize various forms of injustice. Of course, this is not an easy matter. Cooperation from various parties becomes a necessity and is carried out together.

Keywords: policy, human resources, Anthony Giddens, structuration, feminist

Paulus Eko Kristianto adalah alumni S2 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui berkaitan dengan isu gender, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa klasifikasi dalam dua poin besar yaitu; 1. Kebijakan Buta Gender dan 2. Kebijakan Sadar Gender.¹ *Pertama*. Kebijakan Buta Gender (*Gender Blind Policies*) merupakan kebijakan yang tidak mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya adalah latar belakang atau kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan itu sama. Asumsi ini justru mendukung ketimpangan gender dan tetap mempertahankan ketidaksetaraan gender dan kelompok perempuan tetap menjadi kelompok marginal. *Kedua*. Kebijakan Sadar Gender (*Gender Aware Policies*) merupakan kebijakan yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan aktor pembangunan, dan mengakui bahwa pada dasarnya keterlibatan perempuan sangat dipengaruhi oleh peran gendernya dalam masyarakat dan cenderung dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki, sehingga kebijakan ini mengakui adanya perbedaan kebutuhan, kepentingan dan prioritas perempuan dari kebutuhan dan kepentingan laki-laki bahkan perbedaan tersebut bisa benar-benar berseberangan sehingga bisa menimbulkan konflik dengan laki-laki. Lalu, bagaimana bila kebijakan tersebut terintegrasi dengan teori strukturalisme?

Strukturalisme berasal dari gagasan baru dalam filsafat bahasa yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Saussure mengarahkan pemikirannya pada perbedaan antara bahasa (*langue*) dan ujaran atau percakapan (*parole*). Bahasa dan percakapan sebenarnya merupakan perentangan antara apa yang sosial dan individual, antara apa yang hakiki dan kebetulan. Bila diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial contohnya Claude Levi-Strauss, ia mengajak berimplikasi lebih jauh. Dalam bingkai analisis sosial, menemukan kode tersembunyi yang ada di balik gejala kasat mata, sebagaimana bahasa menjadi kunci otonom untuk memahami arti percakapan merupakan hal penting. Sebagai contoh, kita diajak berpikir mendalam bahwa bila ingin memahami gejala dalam

¹ Lihat Dyah Kuswanti, Herliana, "Kebijakan SDM di Tempat Kerja: Sudahkah Sensitif Gender?" dalam Siti Hariti Sastriyani (Ed.). *Gender and Politics* Yogyakarta & Jakarta: Pusat Studi Wanita UGM & Tiara Wacana, 2009.

masyarakat kapitalis, kita harus turut mengarahkan perhatian bukan pada perilaku para pemodal atau konsumen, melainkan logika-internal kinerja modal.²

Berpijak pada pengantar di atas, penulis mengajukan pertanyaan apa itu teori strukturasi? Unsur-unsur apa yang masuk ke dalamnya? Bagaimana teori tersebut bekerja? Melalui pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis mendasarkan pada pemikiran Anthony Giddens. Smith dan Riley menunjukkan Giddens (selain Pierre Bourdieu) dimasukkan dalam filsuf yang menaruh perhatian pada perdebatan antara perspektif mikro dan makro sepanjang periode akhir 1960.³ Hal ini tentu berbeda dengan Norbert Elias. Elias menaruh fokus pada penemuan kembali dan pengusulan sebuah solusi potensial terhadap permasalahan-permasalahan dalam teori sosial hingga beberapa dekade saat ini. Giddens menguraikan pemikirannya pada teori strukturasi. Setidaknya ada dua tema sentral yang menjadi poros pemikirannya, yaitu hubungan antara struktur dan pelaku, serta sentralitas ruang dan waktu. Baginya, poros pertama dipandang sebagai relasi dualitas, sebagaimana saling mengandaikan dan sulit dibayangkan. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana atau medium praktik sosial.⁴

Dalam hal ini, struktur sejajar dan analog dengan bahasa sebagaimana yang mengatasi waktu dan ruang. Di samping itu, praktik sosial analog dengan ujaran atau percakapan dalam waktu dan ruang. Berikutnya, poros ke dua berbicara tentang hal yang menggerakkan teori strukturasi. Waktu dan ruang biasanya dipahami sebagai panggung tindakan. Namun, Giddens melihatnya berbeda. Baginya, Giddens menyatakan bahwa waktu dan ruang merupakan unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat.⁵ Dengan demikian, tanpa ruang dan waktu, tindakan tidak akan terjadi karena keduanya harus menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial. Untuk lebih jelasnya, diskusi teori strukturasi dapat diperhatikan pada bagian berikutnya dengan mengintegrasikan dengan analisa gender.

² B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar* (Jakarta: KPG, 2016), h. 15.

³ Philip Smith and Alexander Riley, *Cultural Theory: An Introduction* (Oxford: Blackwell Publishing, 2009), h. 128.

⁴ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 18.

⁵ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 19.

Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Persoalan Gender

Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan segala jenis kebijakan organisasi yang berkenaan dengan karyawan. Hal ini bisa berupa kebijakan dalam rekrutmen dan seleksi, penempatan karyawan (termasuk di dalamnya promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja), penugasan, gaji dan tunjangan, fasilitas, serta berbagai aturan lain. Pada dasarnya, mereka membuat kebijakan terkait SDM dimaksudkan memaksimalkan kinerja organisasi agar segala sesuatu bisa berjalan lancar. Masalahnya dalam rekrutmen dan seleksi, banyak perusahaan tertentu yang hanya menerima perempuan berpenampilan menarik guna menjadi karyawannya. Sedangkan, perusahaan yang lain mensyaratkan karyawati barunya untuk tidak menikah atau memiliki anak selama waktu tertentu di mana syarat ini tidak berlaku bagi karyawan laki-laki. Selain itu, banyak juga lowongan kerja yang hanya ditujukan pada laki-laki meski sebenarnya perempuan dinilai bisa melakukan pekerjaan yang ditawarkan tersebut.

Melihat cuplikan di atas, penulis merasa hal tersebut dinilai merugikan perempuan karena mereka bisa kehilangan kesempatan mengembangkan diri. Fakta lain penulis peroleh berdasarkan cerita pengalaman terhadap rekan saya (sebut saja namanya Nola) yang berkerja di universitas X. Hal ini digambarkan berikut.

Saya pernah mendapatkan cuti melahirkan selama satu semester penuh. Sebetulnya, kebijakan di universitas saya untuk cuti melahirkan resminya ialah tiga bulan, meski pada praktiknya bisa saja satu bulan setelah melahirkan kami langsung bekerja, tergantung keinginan dan kemampuan masing-masing, termasuk selama cuti, tanggung jawab pengajaran bisa dibebankan pada rekan satu bidang. Ketika saya menanyakan mengapa saya tidak diberi mata kuliah sama sekali selama satu semester, atasan saya justru berkata, “malah enak to, dapat cuti enam bulan”. Saya tahu maksud atasan saya baik. Namun masalahnya, justru bukan itu yang diinginkannya. Ia mampu bekerja kembali paling tidak setelah dua bulan melahirkan. Saya mampu bekerja kembali paling tidak setelah dua bulan melahirkan. Saya pikir saya bisa mengatur waktu untuk anak saya. Saya kan juga butuh dana untuk membiayai anggota keluarga baru. Bila tidak mengajar, penghasilan bisa berkurang dari biasanya diterima.⁶

Melihat pengalaman di atas, gaji dan tunjangan turut merupakan sasaran empuk bagi kebijakan yang timpang gender. Hal ini dikarenakan perempuan sering kali menerima gaji dan tunjangan lebih sedikit dibanding laki-laki dengan posisi pekerjaan yang sama.

⁶ Wawancara pada Sabtu, 14 Januari 2017 pukul 17.00 WIB.

Sebab, hal klasik yang sering dijadikan alasan oleh pemberi kerja ialah perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga. Padahal, alasan tersebut bisa dinilai tidak masuk akal karena banyak juga perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dengan kata lain, hal ini merupakan pelabelan negatif terhadap peran perempuan di mana apa yang dikerjakan dianggap sambil atau tambahan cenderung tidak diperhitungkan. Selain itu, sebagai dasar penentuan gaji dengan berpijak pada jenis kelamin merupakan salah satu bentuk kekerasan yang lain terhadap perempuan.

Kebijakan-kebijakan perusahaan yang didesain untuk mengurangi konflik peran ganda bisa secara langsung mengurangi stress kerja. Biasanya, langkah yang diambil dalam dua hal yakni; *Pertama*. Dengan meningkatkan kontrol tenaga kerja dalam menentukan pemenuhan tuntutan kerja dan keluarga. Hal ini bisa mengurangi kemungkinan mereka menghadapi situasi yang membuat stress. *Kedua*. Dengan membiarkan tenaga kerja mengatur kembali kehidupannya sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik pekerjaan dan keluarga. Bagi penulis, hal ini menjadi penting karena kebijakan organisasi yang berorientasi keluarga bisa mengurangi konflik pekerjaan dan keluarga berupa permasalahan pekerjaan yang bisa mengganggu keluarga dan sebaliknya. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang belum sadar terhadap hal seperti ini. setidaknya, hal ini dialami oleh rekan saya (sebut saja namanya Ratih) yang berkerja di perusahaan Y.

Saya menyusui anak saya hanya sampai berusia tiga bulan. Sebenarnya, saya ingin lebih lama dari itu, tetapi air susu saya tidak keluar lagi setelah kembali bekerja.⁷

Apa yang dialami Ratih mungkin banyak dialami oleh perempuan lain. Bagi penulis, air susu ibu memberikan banyak manfaat pada bayi, di antaranya meningkatkan ketahanan tubuh. Sebetulnya, ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. *Pertama*. Dengan memompa ASI yang kemudian diberikan melalui botol selama kepergian sang ibu. *Kedua*. Membawa bayi ke tempat kerja (jika disediakan penitipan anak di tempat kerja). *Ketiga*. Si bayi diantar ke tempat kerja pada waktu istirahat sehingga bisa disusui oleh ibunya. Dengan kata lain, perusahaan perlu menyediakan atmosfir “*lactation friendly*”. Lantas, bagaimana kita menyikapinya dari sisi teori strukturasi agar perusahaan bisa sadar (*aware*)?

⁷ Wawancara pada Minggu, 15 Januari 2017 pukul 18.00 WIB.

Teori Strukturalisme

Bila diletakkan dalam bingkai refleksi atas ilmu-ilmu sosial, Giddens secara khusus menaruh perhatian pada masalah dualisme yang menggejala. Setidaknya, dualisme ini berupa tegangan antara subyektivisme dan obyektivisme, voluntarisme dan determinisme. Akar dari dualisme ini terdapat pada kerancuan dalam memandang obyek kajian ilmu sosial. Obyek ini merujuk pada praktik sosial yang berulang serta terpola dalam lintas waktu dan ruang.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, praktik sosial bisa dinyatakan berupa tindakan guru mengajar di kelas, pemungutan suara dalam pemilihan umum, menyimpan uang di bank, membawa surat izin mengemudi (SIM) ketika mengendarai sepeda motor atau mobil. Kalau begitu, di mana masalah dualismenya?

Dualitas terletak pada fakta bahwa suatu ‘struktur mirip pedoman’ yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan atas berbagai tindakan kita.⁹ Di sisi lain, skemata yang mirip “aturan” itu juga menjadi sarana medium bagi berlangsungnya praktik sosial kita. Dalam hal ini, Giddens menyebut skemata tersebut sebagai struktur. Baginya, struktur tersebut bersifat memberdayakan dan memungkinkan terjadinya praktik sosial. Dengan kata lain, Giddens menunjukkan obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Dalam prinsip strukturalnya, Giddens menunjukkan adanya tiga struktur yaitu struktur penandaan atau signifikasi (S) berkenaan skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Penguasaan atau dominasi (D) menyangkut skemata penguasaan atas orang dan barang. Pembeneran atau legitimasi (L) berkenaan skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Ketiga prinsip tersebut kemudian saling terkait antara satu dengan lain dalam praktik sosial. Sebagai contoh, Herry-Priyono menunjukkan skemata signifikasi atas orang yang mengajar disebut guru, kemudian pada gilirannya menyangkut skemata dominasi

⁸ Kita perlu memahami bingkai obyek utama ilmu sosial terletak pada dimensi peran sosial sebagaimana dalam fungsionalisme Talcott Parsons, interaksionisme-simbolis Erving Goffman, marxisme, kajian bahasa dan ujaran atau percakapan sebagaimana dalam strukturalisme Ferdinand de Saussure dan kode tersembunyi sebagaimana dalam Claude Levi-Strauss, post-strukturalisme Michael Foucault, pemikiran Jacques Derrida, dan sebagainya. Berbeda dengan semuanya, Giddens berfokus pada dualisme yang menggejala dalam teori ilmu-ilmu sosial.

⁹ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 22.

otoritas guru atas murid, dan skemata legitimasi hak guru atas pengadaan ujian untuk menilai proses belajar murid.¹⁰

Dualitas antara struktur dan tindakan selalu melibatkan sarana antara. Penulis melihat sarana antara tersebut menunjuk pada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat bisa dipahami dua pemikiran, yaitu segi asosiasi sosial atau interaksi dan kesatuan yang memiliki batas-batas yang menandainya dari masyarakat lain sekitarnya. Bagi Giddens, seluruh masyarakat merupakan sistem sosial dan sekaligus terdiri dari persinggungan-persinggungan sistem sosial ganda.¹¹ Sistem ganda demikian bersifat internal bagi masyarakat atau bisa berjalan melintasi bagian ‘luar’ dan ‘dalam’, dengan membentuk keanekaragaman atas kemungkinan mode-mode hubungan antara totalitas kemasyarakatan dan sistem antar kemasyarakatan. Dalam hal ini, sistem antar kemasyarakatan bukanlah sepihan yang didasarkan pada kenyataan yang ada dan secara khas melibatkan bentuk-bentuk hubungan antara masyarakat dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Kalau demikian, masyarakat bisa dikatakan sebagai sistem-sistem sosial yang menonjol dalam pembebasan dasar yang berasal dari latar belakang sederet hubungan sistemik lain tempat terjadinya sistem sosial itu. Sistem tersebut bisa dibilang menonjol karena adanya prinsip-prinsip struktural yang pasti mampu berfungsi menghasilkan keseluruhan kumpulan institusi yang bisa dispesifikasikan pada lintas ruang dan waktu.

Secara singkat, sistem sosial merupakan pelembagaan dan regularisasi praktik-praktik sosial. Kalau demikian, bagaimana kaitan antara struktur, praktik sosial, dan sistem sosial? Herry-Priyono memberi contoh dalam bingkai skematis tentang praktik, sistem, dan struktur ekonomi kapitalis berikut.¹²

Struktur Sosial	Sistem Sosial	Praktik Sosial
S (teori dan wacana akumulasi laba) -D-L D (tingkatan garis otoritas)-	Perusahaan: Institusionalisasi dan regularisasi praktik sosial	Rapat dewan direksi, produksi, barang/ jasa, pembukuan, rekrutmen,

¹⁰ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 25.

¹¹ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial* terj. Adi Loka Sujono (Yogyakarta: Penerbit Pedati, 2011), h. 204.

¹² B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 32.

S-L D (keramatnya hak milik pribadi)-S-L L (peraturan kontrak kerja)-D-S	berdasar skemata S-D-L	transaksi, investasi, reklame, dsb.
--	------------------------	-------------------------------------

Melihat tabel di atas, kita bisa melihat bahwa istilah dominasi ada pada tataran bahasa, sedangkan kekuasaan ada pada dataran ujaran atau percakapan. Dalam hal ini, kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur ataupun sistem, melainkan kapasitas yang melekat pada pelaku.¹³ Oleh karenanya, kita perlu memahami tiga dimensi internal pelaku.

Giddens membedakan tiga dimensi tersebut menjadi motivasi tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursus. Ketiga dimensi ini perlu diberi perhatian karena bila tidak teliti akan bertabrakan dengan bingkai pemikiran Sigmund Freud.¹⁴ Hal ini dilakukan Giddens karena ia tidak percaya kalau istilah demikian sangat membantu sehingga ia mengganti pembagian ketiganya dengan model tersebut. Oleh karenanya, Giddens tidak menyejajarkan ketiga istilah itu dengan gagasan Freud secara langsung. Bidang-bidang yang bersinggungan dengan norma dan skema interpretatif yang dimanfaatkan para aktor dalam pembentukan perilakunya disisipkan dalam ketiga dimensi kepribadian secara keseluruhan. Walau demikian, 'I' (*das Ich*) berada dalam inti apa yang terlibat dalam kesadaran diskursif dan secara konseptual menuntut perhatian yang besar. Giddens mengingatkan anggapan 'I' sebagai agen perlu dikaji lagi. Bagi Giddens, agar bisa menghubungkan 'I' dengan agensi, perlu diikuti jalan memutar yang disarankan kalangan strukturalis berdasarkan desentralisasi subyek, tanpa mencapai kesimpulan yang memperlakukan subyek hanya sebagai tanda dalam suatu struktur signifikasi.¹⁵ Kalau demikian, bagaimana kita bisa memahami 'I'? Giddens mengingatkan bahwa pembentukan 'I' terjadi hanya melalui wacana orang lain yaitu melalui pemerolehan bahasa. Namun, 'I' harus dikaitkan dengan tubuh sebagai bidang tindakan. Masalahnya, apakah agen tersebut mampu bertindak dengan sadar? Kesadaran di sini dimaknai sebagai kemampuan memberikan uraian yang runtut tentang aktivitas-

¹³ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 33.

¹⁴ Freud membagi organisasi fisik individu ke dalam tiga bagian yaitu 'id', 'ego', dan 'super-ego'.

¹⁵ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 53.

aktivitas kita dan juga mengenai alasan dalam melaksanakan aktivitas itu. Bagi Giddens, pemetaan kesadaran menjadi penting. Setidaknya, ia menguraikannya sebagai berikut.

Motivasi tak sadar dipahami sebagai sebuah keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan tapi bukan tindakan itu sendiri.¹⁶ Hal ini dapat diperhatikan ketika tindakan kita pergi ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian. Giddens menunjukkan bahwa ketaksadaran hanya bisa dipahami dari memori dan pada gilirannya berarti harus menyelidiki dengan agak cepat apa itu memori. Memori bisa saja dipahami sebagai suatu hal yang berangkat dari pengalaman masa lalu. Bahkan, memori turut menjadi piranti pengingatan kembali sebagai suatu mode menarik informasi atau mengingat. Dalam mengelola memori, kita tidak bisa melupakan adanya persepsi. Persepsi telah diorganisasikan melalui informasi yang masuk dan dicerna dalam waktu yang lama. Persepsi normalnya melibatkan gerakan aktif mata terus-menerus, dan biasanya kepala, bahkan sewaktu tubuh dalam keadaan istirahat sekalipun. Dengan kata lain, acuan pokoknya bukanlah indera tunggal maupun perasa kontemplatifnya melainkan merasakan secara aktif dunia sosial dan material. Maka, kita bisa mengatakan pengolahan demikian dapat dipahami sebagai sesuatu yang terlibat dengan usaha memonitor secara refleksif tindakan secara umum. Contohnya, bayi tidak hanya memiliki organ-organ indera melainkan memiliki skema yang secara neurologis telah mapan yang memungkinkannya merespon secara selektif terhadap dunia sekitarnya, bahkan selektivitas itu relatif besar dibandingkan dengan apa yang dikembangkan berikutnya. Oleh karenanya, bayi merespon lingkungan dengan menggerakkan kepalanya ke arah asal bunyi-bunyian mengikuti obyek yang bergerak secara visual dan berusaha menggapainya tangannya ke arah obyek-obyek itu.

Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Dengan kata lain, kesadaran model ini mengajak pada adanya gugus pengetahuan yang sudah diandaikan.¹⁷ Kita seolah diajak tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus mempertanyakan terus-menerus apa yang terjadi atau mesti dilakukan. Contohnya, kita tidak harus bertanya mengapa kita

¹⁶ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 28.

¹⁷ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 29.

menghentikan mobil atau sepeda motor ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Kesadaran ini turut menjadi kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial lambat-laun bisa menjadi struktur, kemudian bagaimana struktur tersebut dapat mengekang serta memampukan tindakan atau praktik sosial kita. Dengan demikian, reproduksi sosial bisa dimungkinkan terjadi karena adanya keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi. Berbicara tentang **kesadaran diskursif**, kita akan menemui sedikit kesulitan. Sebab, kesadaran diskursif memiliki batas yang tipis dengan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif mengandung arti bentuk-bentuk ingatan yang mampu diekspresikan secara verbal oleh aktor bersangkutan. Sedangkan, kesadaran praktis melibatkan ingatan yang aksesnya dimiliki agen dalam tindakan tanpa mampu mengekspresikan apa yang dia ketahui.¹⁸ Dalam praktiknya, teori strukturasi lebih memerhatikan kesadaran praktis dibandingkan diskursif walaupun masih keduanya tetap perlu. Hal ini terjadi karena teori strukturasi lebih memerhatikan apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan. Dengan demikian, poin perhatian teori strukturasi mengacu pada apa yang dilakukan agensi.

Perentangan Waktu dan Ruang

Masih dalam bingkai strukturasi, Giddens turut mengetengahkan kajian perentangan waktu dan ruang. Bagaimana tidak, semua tindakan hanya berlangsung dalam waktu dan ruang. Pada masa tradisional bila kita hendak menghubungi orang lain, maka kita harus berkunjung ke tempat lain dalam kurun waktu yang lama. Tetapi, hal tersebut tidak lagi berlaku sekarang. Kita bisa dengan cepat menelpon orang tersebut tanpa harus mengunjunginya. Perentangan waktu dan ruang telah memberi tempat adanya proses pencabutan. Pencabutan waktu dari ruang dalam skala global menimbulkan adanya globalisasi, termasuk kapitalisme. Kapitalisme merupakan prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif.¹⁹

Diskusi perentangan waktu dan ruang turut menyinggung bahasan regionalisasi. Giddens mengingatkan regionalisasi tidak hanya dipahami sebagai lokalisasi dalam

¹⁸ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 61.

¹⁹ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 43.

ruang namun mengacu pada penentuan zona ruang waktu dalam kaitannya dengan praktik-praktik sosial yang dirutinkan.²⁰ Regionalisasi memiliki mode-mode berupa bentuk, durasi, karakter, dan rentang. Bentuk pada bagian ini mengarah pada batas. Giddens memberi contoh pada sebagian besar lokal, batas-batas yang memisahkan kawasan-kawasan memiliki penanda-penanda fisik atau simbolis. Penanda-penanda demikian memungkinkan terjadinya kehadiran merembes ke berbagai kawasan yang bersebelahan. Di lain pihak, dinding-dinding antara kamar-kamar, bisa menjadi batas regionalisasi sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun media kehadiran bersama yang bisa menembusnya. Tentu saja, kita perlu memahami bahwa bila tembok-tembok itu tipis maka dimungkinkan terjadinya berbagai jenis interupsi atau gangguan atau rasa malu pada penutupan perjumpaan-perjumpaan.

Regionalisasi bisa meliputi berbagai ragam zona dalam rentang atau skala. Kawasan-kawasan yang luas rentangannya adalah kawasan yang meluas dalam ruang dan mendalam dalam waktu. Tentu saja, persimpangan rentang ruang dan waktu bisa beragam, namun kawasan-kawasan yang memiliki rentang yang besar biasanya cenderung tergantung pada derajat institusionalisasi yang tinggi. Kawasan di sini bisa digunakan dalam geografi yang mengacu pada daerah yang berbatasan secara fisik pada peta ciri-ciri fisik lingkungan material. Selain rentang, regionalisasi turut menyinggung karakter. Karakter dipahami sebagai sesuatu yang merujuk pada mode-mode penataan organisasi ruang-waktu lokal-lokal dalam sistem sosial yang lebih luas. Karakter turut membuat berkembangnya kapitalisme modern dengan pembedaan antara rumah dan tempat kerja, serta berbagai implikasi-implikasi yang sangat besar bagi keseluruhan organisasi sistem produksi dan sifat-sifat institusional utama lain dari masyarakat kontemporer.²¹ Bagian penting dari aspek karakter ialah adanya tataran kemampuan untuk munculnya kehadiran dalam kaitannya dengan berbagai bentuk. Dalam hal ini, masyarakat yang tinggi kemampuan kehadirannya dalam semua budaya, sebelum beberapa ratus tahun yang lalu masih merupakan pengelompokan individu dalam kedekatan fisik satu sama lain.

²⁰ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 148.

²¹ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 152.

Ruang dan waktu memang telah mengalami proses transformasi dan seolah tidak berjarak lagi. Namun, Giddens mengingatkan transformasi turut merambah pada persoalan tradisi, adat, dan berbagai gugus kepercayaan lain. Hal ini bisa diamati dalam berbagai gejala sehari-hari di mana kita bisa menyaksikan praktik yang didasarkan pada penghapusan masa lalu. Semua gejala tersebut terkait dengan *reflexive monitoring of action* pada taraf individual.²² Praktik sosial telah dikaji dan dibaharui terus-menerus menurut informasi baru yang pada gilirannya mengubah praktik sosial tersebut secara konstitutif. Refleksivitas institusional juga menyangkut soal ketatanegaraan. Ketika Giddens mengatakan tak ada otoritas kalau tak ada demokrasi. Hal tersebut dimaknai demokrasi merupakan bentuk refleksivitas institusional dalam pengorganisasian hidup bersama yang paling sesuai dengan kondisi modernitas. Dengan kata lain, sah tidaknya otoritas politik dalam kondisi modern semakin terkait dengan demokratis tidaknya pelaksanaan otoritas tersebut.²³

Perubahan Sosial, Evolusi, dan Kekuasaan

Pemikiran Giddens berikutnya yang masih menjadi bingkai strukturasi ialah berkenaan dengan perubahan sosial, evolusi, dan kekuasaan. Beberapa perubahan sosial memang berhubungan dengan konsepsi-konsepsi di atas. Misalnya, kita menemukan anggapan bahwa ada hukum universal yang mengatur perubahan sosial dan telah diorganisasikan di sekitar hukum-hukum tersebut. Walau demikian, kita bisa menemukan banyak usaha yang telah ditempuh guna menjelaskan perubahan yang membuat postulat hukum-hukum, spesifikasi prinsip-prinsip tertentu yang terbatas tentang determinasi perubahan yang dianggap bisa diterapkan pada sesuatu seperti halnya cara yang universal.²⁴

Evolusi bisa dipahami dari berbagai sisi, khususnya ilmu alam. Namun, Giddens mencoba melihat evolusi dari sisi ilmu sosial.²⁵ *Pertama*, penggunaan istilah “evolusi” dalam ilmu-ilmu sosial menjadi tidak beralasan apabila tidak ada hubungan kosakata konseptual yang telah mapan dalam biologi. Contohnya, evolusionisme Darwinisme telah memperoleh serangan dalam ilmu alam dan memungkinkan bisa dipahami bahwa

²² B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 47.

²³ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, h. 48.

²⁴ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 282.

²⁵ Lihat Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 286-288.

istilah tersebut bisa diabaikan begitu saja, tapi hendaknya tetap dipertahankan dalam ilmu sosial. *Kedua*, evolusi sosial tentu menetapkan sesuatu lebih dari sekadar gerak maju perubahan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, yaitu sesuatu yang menjadi suatu mekanisme perubahan. Evolusi memang bisa digunakan hanya untuk mengacu pada gerak maju dengan mengacu pada ruang dan waktu. Namun, kita tidak bisa menyalahkan apabila budaya-budaya lisan yang kecil telah berada di satu ujung garis kontinum distribusi dan konsumsi energi. *Ketiga*, kita setidaknya diajak belajar menetapkan suatu rangkaian tahap perkembangan sosial di mana mekanisme perubahan telah dilibatkan di dalamnya dengan jalan memisahkan berbagai jenis atau aspek tertentu dari organisasi sosial dari jenis atau aspek lain. Tahapan tersebut bisa jadi disusun dalam evolusi khusus atau umum, dan/ atau gabungan keduanya. *Keempat*, identifikasi mekanisme perubahan sosial berarti menjelaskan adanya perubahan dengan menggunakan berbagai cara yang bisa diterapkan pada seluruh sejarah manusia, dan bukan sebagai mekanisme perubahan yang eksklusif, melainkan dominan. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa tidak semua perubahan sosial yang tergantung pada konsep adaptasi bersifat evolusioner.

Kita harus sadar bahwa setiap perubahan sosial sebenarnya bersifat episode. Artinya, kita bisa menganggapnya sebagai sejumlah tindakan atau peristiwa yang memiliki awal dan akhir yang bisa dikenali, sehingga melibatkan suatu rangkaian khusus. Bagaimana tidak, ketika kita membahas episode-episode berskala luas, Giddens memaksudkannya sebagai rangkaian perubahan yang bisa dikenali yang mempengaruhi institusi utama dalam suatu totalitas kemasyarakatan atau yang melibatkan peralihan antara jenis-jenis totalitas kemasyarakatan.²⁶ Jenis perubahan sosial yang terlibat dalam suatu episode ialah menunjukkan seberapa dalam dan luas perubahan sosial itu terjadi. Secara detail, hal ini dinyatakan bagaimana serangkaian perubahan mengganggu atau membentuk kembali penyatuan institusi-institusi yang ada dan seberapa luas kisaran perubahan-perubahan seperti tersebut.

Teori kekuasaan yang telah direkonstruksi sebaiknya dimulai dari premis bahwa pandangan-pandangan seperti demikian tidak dapat dipertahankan. Dalam hal ini, kita turut sadar bahwa kekuasaan tidak harus dikaitkan dengan konflik, baik pembagian

²⁶ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 303.

kepentingan ataupun perjuangan aktif. Sebab, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mencapai hasil, dan apakah hasil tersebut berkaitan dengan kepentingan yang sebagian saja bersifat murni atau tidak berhubungan erat dengan definisinya. Bagaimana tidak, perkembangan kekuatan atau ancaman bukanlah jenis kasus penggunaan kekuasaan. Berpijak pada pemikiran tersebut, Giddens mengusulkan gagasan pengambilan jarak ruang-waktu hendaknya secara langsung dikaitkan dengan teori kekuasaan. Dalam mengeksplorasi hubungan ini, kita bisa mengembangkan kerangka pokok dominasi sebagai sifat sistem sosial yang bisa diperluas. Kenyataan ini dinyatakan karena adanya dua sumber daya yang perlu diperhatikan yaitu alokatif dan otoritatif.

Sumber Daya Alokatif	Sumber Daya Otoritatif
1. Ciri lingkungan material (bahan mentah, sumber kekuasaan materi).	1. Organisasi ruang-waktu sosial (penyusunan jalur dan kawasan secara temporal-spasial).
2. Alat produksi atau reproduksi material (piranti produksi, teknologi).	2. Produksi dan reproduksi tubuh (organisasi dan hubungan kemanusiaan secara timbal balik).
3. Barang hasil produksi (artefak yang diciptakan oleh interaksi 1 dan 2).	3. Organisasi perubahan hidup (penyusunan kesempatan untuk pengembangan dan pengungkapan diri).

Pengumpulan sumberdaya-sumberdaya alokatif terlibat erat dengan penjarakan ruang-waktu, kesinambungan masyarakat lintas ruang dan waktu dan juga menghasilkan kekuasaan. Penyimpanan sumber daya otoritatif dan alokatif bisa dipahami sebagai usaha untuk melibatkan penarikan dan mengendalikan informasi atau pengetahuan yang diabadikan oleh hubungan-hubungan sosial lintas ruang-waktu. Penyimpanan demikian menduga perlunya media representasi informasi, mode-mode pengingatan atau penarikan informasi dan dengan segala sumber daya juga mode-mode penyebarannya.

Kritik terhadap Teori Strukturasi Giddens

Giddens menunjukkan pengakuan bahwa masyarakat, di dalamnya terdapat unsur yang terpenting yaitu struktur dan individu. Kalaupun, ia menyebutnya sebagai strukturasi,

sebenarnya ia menyebutnya sebagai struktur yang bersifat dinamis. Generalisasi yang dibangun oleh Giddens tidak bersifat mutlak, sebagaimana dalam konsep ruang dan waktu. Lalu pada akhirnya dengan teori strukturasinya, ia tetap berusaha untuk mempertahankan keyakinan bahwa masyarakat akan selalu berubah sepanjang ruang dan waktu.

Dalam perjalanannya, pemikiran Giddens telah dikritik para ahli teori sosial-politik yakni Taylor, Margaret Archer, dan Layder. Mereka mengkritik pandangan Giddens yang menyatakan bahwa struktur agensi saling berkaitan satu dengan satu hal yang sama. Bagi Archer, peleburan paksa ini berdampak pada kesulitan untuk meneliti bagaimana sesungguhnya dialektika struktur dengan agensi.²⁷ Oleh karenanya, C. Hay dan B. Jessop makin menjelaskannya bahwa struktur dan agensi sebaiknya diperlakukan sebagai dua hal yang berbeda dan menempatkan struktur sebagai titik awal dan aksi terjadi dalam sebuah konteks struktur yang ada, dan agensi dapat melakukan pilihan selektif-strategis tertentu dibandingkan dengan yang lain.²⁸ Pembelajaran strategis dapat membuat agen mampu mengubah keadaan struktural melalui satu proses aktif strategis. Strategi yang dilakukan individu atau kelompok telah menimbulkan efek sesuai dengan keinginan atau bahkan di luar keinginan dan perhitungan semula.

Archer menunjukkan cara untuk menghindari dualisme struktur dan agensi bukan dengan menyatukannya sebagaimana dilakukan Giddens, melainkan hubungan dialektis antara struktur dan agensi hanya dapat dijelaskan dengan baik. Secara jelas, hal ini dapat dipahami melalui uraian berikut;

1. **Pengkondisian struktural.** Bagian ini mengacu pada adanya konteks tempat tindakan terjadi sebagai akibat tindakan sebelumnya dengan melahirkan kondisi tertentu. Kondisi ini tentunya telah memengaruhi kepentingan orang lain, misalnya pengaturan kerja, kesempatan dalam pendidikan, dan gaya hidup.
2. **Interaksi kedua.** Bagian ini mensinyalir bahwa agen-agen dipengaruhi oleh kondisi yang terstruktur pada bagian pengkondisian struktural. Walau demikian, mereka tetap memiliki independensi untuk memengaruhi peristiwa. Dalam pola ini, individu

²⁷ M.S. Archer. *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), h. 46.

²⁸ C. Hay. *Re-Stating Social and Political Change* (Buckingham: Open University Press, 1996), h. 56.

dan kelompok dimungkinkan saling berinteraksi, melaksanakan kemampuan, keahlian, dan kepribadian masing-masing. Agen akan berupaya memajukan kepentingannya masing-masing dan memengaruhi hasil. Tahap ini dimungkinkan terjadi konflik, negosiasi, dan consensus antar gen.

3. **Elaborasi struktur.** Bagian ini merupakan perwujudan akibat tindakan dari interaksi kedua pada taraf tertentu dengan kondisi structural yang berubah. Agen berhasil mengubah kondisi tertentu agar sesuai dengan kepentingan mereka, sementara yang lain mungkin gagal. Sebab, perubahan struktural terjadi sebagai akibat konflik atau kompromi.

Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, dan Margaret Archer

Sebagaimana kalimat dalam bagian pengantar, Smith dan Riley menunjukkan Giddens dan Pierre Bourdieu dimasukkan dalam filsuf yang menaruh perhatian pada perdebatan antara perspektif mikro dan makro. Berdasarkan interpretasi Giddens, Collins menunjukkan proses makro merupakan hasil interaksi dalam situasi mikro.²⁹ Collins meyakini tataran makro hanya terdiri dari agregasi pengalaman-pengalaman mikro. Collins menjelaskan mikro merupakan situasi interaksi yang terbatas dalam ruang dan waktu. Namun, Giddens merasa jawaban ini tidak banyak membantu. Sebab bagi Giddens, perjumpaan-perjumpaan itu tidak hanya meluncur begitu saja dalam waktu, tetapi ketika kita mulai peduli terhadap bagaimana perjumpaan-perjumpaan itu dilaksanakan oleh aktor-aktor pesertanya, dan menjadi jelas bahwa tidak ada interaksi. Bagaimanapun, interaksi telah diendapkan dalam waktu dan pengertian yang dicapai hanya dengan mempertimbangkan karakter berulang dan rutin. Perbedaan mikro dan makro menjadi tidak tepat karena pembentukan dan pembentukan kembali perjumpaan-perjumpaan tertentu terjadi dalam proses interaksi.

Berlanjut pada pemetaan Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, dan Margaret Archer, kita bisa melihat bahwa Bourdieu mengemukakan istilah yang berbeda dengan yang disampaikan Giddens dan Archer. Setidaknya, perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang lingkungan intelektualnya. Bourdieu merupakan intelektual dari Perancis,

²⁹ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, h. 175.

sedangkan Giddens dan Archer ialah sosiolog dari Inggris. Bourdieu mengajukan istilah *habitus* dan *field* (lapangan, bidang). *Habitus* merupakan struktur mental atau kognitif yang diinternalkan melalui individu dengan memahami kehidupan sosial. *Habitus* dihasilkan serta menghasilkan masyarakat. Sedangkan, *field* merupakan jaringan hubungan antara berbagai posisi obyektif. Struktur lapangan membantu memaksa atau menghambat agen yang dapat bersifat individual ataupun kolektif.

Analisis Gender

Guna memahami konsep “gender”, kita harus membedakan kata “gender” dengan kata “seks” (jenis kelamin. Jenis kelamin (*sex*) merupakan pembagian dua jenis kelamin yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Katakanlah, bahwa laki-laki memiliki penis, jakala (*kala menjing*), dan memproduksi sperma. Sedangkan, perempuan memiliki alat reproduksi berupa rahim dan saluran melahirkan, memproduksi sel telur, vagina, dan alat menyusui. Berbagai alat-alat tersebut melekat pada manusia dengan menimbulkan spesifikasinya jenis kelamin masing-masing. Berbagai alat kelamin tersebut pun tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Secara permanen, hal tersebut tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Kedua karakteristik tersebut dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Rupanya, pertukaran ciri tersebut dapat dinyatakan melalui penggambaran zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Hal ini juga terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibanding kaum laki-laki. Maka, semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, hal inilah yang dikenal dengan konsep “gender”.

Pemahaman “gender” telah menimbulkan perbedaan gender. Perbedaan gender telah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, maka menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender tersebut, seperti kaum perempuan lemah lembut dan laki-laki kuat perkasa. Tetapi, kita bisa memahami bahwa selama sifat tersebut bisa dipertukarkan maka hal ini merupakan produk konstruksi masyarakat. Masalahnya, perbedaan gender telah menimbulkan persoalan tertentu. Misalnya, sering dikatakan mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal kenyataannya, semuanya itu merupakan produk konstruksi perempuan. Maka, laki-laki turut dimungkinkan mengerjakan tugas-tugas tersebut.

Bila ditelaah lebih jauh, perbedaan gender bisa menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban atasnya. Mansour Fakih mengklasifikasikan ketidakadilan gender dinyatakan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.³⁰ Secara detail, hal tersebut dapat diperhatikan pada uraian berikut.

1. Marginalisasi

Marginalisasi dimungkinkan menimbulkan kemiskinan. Katakanlah, program swasembada pangan atau revolusi hijau secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Bagaimana tidak, di Jawa, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, maka tidak memungkinkan lagi dengan *ani-ani*. Padahal, *ani-ani* melekat dan digunakan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan

³⁰ Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 12-13.

miskin di desa termarginalisasi sehingga mereka menjadi semakin miskin dan tersingkir karena tidak memperoleh pekerjaan di sawah pada musim panen. Marginalisasi tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, melainkan dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan hadirnya adat istiadat dan tafsir keagamaan. Misalnya, banyak di antara suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada perempuan untuk memperoleh warisan.

2. **Subordinasi**

Subordinasi dimungkinkan terjadi dalam berbagai bentuk dan waktu. Katakanlah di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Dalam rumah tangga, masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan memperoleh prioritas utama. Pemikiran demikian dimungkinkan muncul dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. **Stereotype**

Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya, stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, stereotype yang melekat pada perempuan. Perempuan yang bersolek dinilai guna memancing lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype demikian. Bahkan bila ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan. Sebab, masyarakat meyakini perempuan harus mengenakan pakaian tertutup dan tidak menarik perhatian laki-laki. Bagi Fakih, stereotype demikian dikarenakan pendidikan perempuan sering dinomorduakan sehingga banyak peraturan pemerintah, keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan berpijak pada stereotype tersebut.³¹

4. **Kekerasan**

³¹ Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, h. 17.

Kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan biasa dikemas dalam delapan hal yakni³²;

Pertama. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Hubungan seksual baru dikatakan perkosaan apabila seseorang memaksa partnernya guna memperoleh pelayanan seksual terhadapnya. Partner cenderung sulit menolak dikarenakan perasaan ketakutan, malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun budaya, serta tidak ada pilihan lain.

Kedua. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk penyiksaan terhadap anak-anak.

Ketiga. Penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, termasuk penyunatan terhadap anak perempuan. Penyunatan perempuan biasa dilakukan dengan anggapan dan bias gender, di antaranya mengontrol kaum perempuan.

Keempat. Kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan kelemahan ekonomi. Dalam hal ini, negara dan masyarakat kerap menggunakan standar ganda terhadap mereka, yakni di satu sisi, pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi di pihak lain, negara memperoleh pajak darinya. Selain itu, seorang pelacur kerap dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu ramai dikunjungi orang.

Kelima. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan, termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap di mana tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang. *Keenam.* Pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (KB). Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut. Maka lantaran bias gender,

³² Lihat Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, h. 17-20.

perempuan kerap dipaksa sterilisasi yang dapat membahayakan fisik maupun jiwa mereka. *Ketujuh.* Jenis kekerasan terselubung. Kekerasan ini biasa dilakukan dengan cara memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Hal ini biasa dilakukan di tempat umum yang ramai. *Kedelapan.* Pelecehan seksual. Pelecehan seksual kerap dilakukan dengan dalih sebagai tindakan untuk membangun persahabatan erat, padahal tindakan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Hal ini biasa dilakukan dalam bentuk³³; [1] Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif. [2] Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. [3] Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau pribadinya. [4] Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk memperoleh kerja atau janji lainnya. [5] Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa seizing dari yang bersangkutan.

Beban Kerja

Beban kerja biasa digambarkan dengan banyak kaum perempuan harus bekerja keras dan lama guna menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya. Hal ini dilakukan mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, dan mencari air untuk mandi. Bahkan dalam kalangan keluarga miskin, beban yang berat turut ditanggungkan ke mereka melalui bekerja. Beban ganda makin diperkuat karena adanya penilaian masyarakat bahwa pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai rendah dibanding pekerjaan laki-laki. Selain itu, perempuan sering disosialisasikan menekuni peran gender mereka, tetapi di pihak lain laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai pekerjaan domestik demikian. Semua dilakukan guna memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

³³ Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, h. 20.

Berpijak pada uraian kelima bentuk manifestasi ketidakadilan gender, kita bisa melihat bahwa akar kesemuanya itu dikarenakan empat hal di antaranya³⁴; *Pertama*. Manifestasi ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara. Hal ini diindikasikan di mana banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan, serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasikan ketidakadilan gender. *Kedua*. Ketidakadilan turut terjadi di tempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. Hal ini ditandai banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. *Ketiga*. Ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat di berbagai kelompok etnik, budaya suku-suku, serta tafsiran keagamaan. *Keempat*. Ketidakadilan gender turut terjadi di lingkungan rumah tangga. Hal ini dinyatakan melalui proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, dan interaksi antaranggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari yang dilakukan menggunakan asumsi bias gender.

Integrasi Teori Strukturasi dengan Analisis Gender

Perlu diketahui bahwa teori strukturasi Giddens memang belum mengintegrasikan gender di dalamnya sehingga bila kita hendak menggunakannya dalam rangka melihat struktur kebijakan SDM di tempat kerja, maka kita perlu melibatkan analisis gender. Setidaknya, hal ini dapat diperhatikan melalui diskusi berikut. Kebijakan sadar gender harus meresap pada ruang struktur, sistem, dan praktik sosial bila berpijak pada uraian Giddens. Bila terintegrasi dengan analisis gender, maka kebijakan diupayakan menghindarkan perlakuan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Setidaknya, hal ini dilakukan dengan memandang perempuan setara dengan laki-laki, serta mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhannya.

Kebijakan SDM sadar gender dilakukan melalui dua hal yakni³⁵; *Pertama*. Mensosialisasikan pemahaman tentang gender di kalangan anggota organisasi, baik pembuat keputusan maupun karyawan. *Kedua*. Berupaya membangun keseimbangan gender dalam jajaran pembuat keputusan di organisasi. Dengan adanya wakil yang

³⁴ Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, h. 22-23.

³⁵ Herliana Dyah Kuswanti, "Kebijakan SDM di Tempat Kerja: Sudahkah Sensitif Gender?" dalam Siti Hariti Sastryani (Ed.). *Gender and Politics* (Yogyakarta & Jakarta: Pusat Studi Wanita UGM & Tiara Wacana, 2009), h. 288.

seimbang antara laki-laki dan perempuan, maka organisasi diharapkan mampu menampung dan memahami permasalahan yang dirasakan baik oleh laki-laki dan perempuan, dan membuat kebijakan yang tepat dengan perspektif yang seimbang dalam mengatasi permasalahan. Namun bagi penulis, akar dari semuanya itu bersumber dari pengembangan budaya *family friendly* yang kerap dinyatakan dalam bentuk *flextime*, *teleworking*, pemberian cuti ketika anak sakit yang diterapkan pada karyawan laki-laki dan perempuan. Sebab, bila kebijakan tersebut hanya diterapkan pada perempuan saja, maka kita bisa berpikir adanya upaya pelestarian terhadap pandangan tradisional masyarakat mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan di mana tanggung jawab kehidupan keluarga terletak pada perempuan.

Namun, peran pemerintah terhadapnya menjadi penting. Hal ini dilakukan melalui provokasi pemerintah pada organisasi tempat bekerja agar membuat kebijakan SDM yang sadar gender, termasuk pemberian upah yang setara antara laki-laki dan perempuan, pemberian cuti haid, dan pencegahan diskriminasi terhadap karyawan perempuan. Selain itu, pemerintah turut mengadvokasi adanya kebijakan yang menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan keluarga. Hal ini memang tidak mudah namun harus dicari jalan tengahnya. Dengan demikian, pemerintah turut membangun paradigma masyarakat terhadap sadar gender, termasuk mengurangi tuntutan masyarakat terhadap perempuan yang mengharuskan mereka bisa menangani semua permasalahan di kantor dan rumah.

Penutup

Konsep kunci teori strukturasi menurut Anthony Giddens ialah penyatuan dua pandangan yang dominan dan oposisional, oposisional antara agen (individu) dan struktur (sosial), antara yang memberikan keistimewaan pada kekuasaan. Berbeda dengan Giddens, Margaret Archer menolak agen dan struktur sebagai dualitas, tetapi sebagai dua hal yang dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemisahan ini akan membantu kita untuk menganalisis hubungan yang satu dengan lain. Dalam hal ini, Archer memang sedang memperluas gagasannya dalam menganalisis hubungan antara kultur (struktur) dengan agen secara dialektis. Lalu, bagaimana bila dialektika tersebut terhubung dengan analisa gender sehingga membangun kebijakan SDM yang sadar

gender? Melalui uraian-uraian di atas, kita bisa memahami bahwa pembangunan sadar gender bisa berangkat melalui struktur, sistem, dan praktik sosial sebagaimana uraian Giddens.

Daftar Pustaka

- Dyah Kuswanti, Herliana, “Kebijakan SDM di Tempat Kerja: Sudahkah Sensitif Gender?” dalam Siti Hariti Sastriyani (Ed.). *Gender and Politics* Yogyakarta & Jakarta: Pusat Studi Wanita UGM & Tiara Wacana, 2009.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Teori Strukturalisasi untuk Analisis Sosial*, terj. Adi Loka Sujono Yogyakarta: Penerbit Pedati, 2011.
- Hay, C. *Re-Stating Social and Political Change* Buckingham: Open University Press, 1996.
- Herry-Priyono, B. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar* Jakarta: KPG, 2016.
- S. Archer, M. *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach* Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Smith, Philip dan Alexander Riley. *Cultural Theory: An Introduction* Oxford: Blackwell Publishing, 2009.